

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KANTOR CAMAT KECAMATAN ARSE KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Oleh:

Khoirul Kholik Nasution^{√)}

Abstract

This research has aims to describe and analyze planning development process in Arse District, Tapanuli Selatan Regency, society development participation in Arse District, Tapanuli Selatan Regency. This research belongs to qualitative research aiming to describe in detail and deeply about society participation in development planning in Arse District, Tapanuli Selatan Regency. Data collecting technique used in this research was structured interview and observation. Data analysis used interactive model analysis from Miles and Huberman consisting of data reduction, data display and data verification and conclusion drawing. From the research result, it can be concluded that Planning development process has not implemented well in Arse District, Tapanuli Selatan Regency, some steps of development planning process in every village had not been held, which were preparation step and discussion step, in district Musrenbang level, some development planning steps also had not been held, especially in step which people were involved to decide important program proposed to regency level. Society participation in development planning in Arse District was still low. Therefore, it needs an accomplishment in participative development planning, an optimization of problem identification and society need assessment, and an improvement of understanding from village and district bureaucracy staffs and society element about development planning.

Keywords: *Society Participation, Planning Development, Participative Planning Characteristics*

I. PENDAHULUAN

Strategi pembangunan yang terlalu sentralistik merupakan contoh ketidakpastian birokrasi masa lalu terhadap variasi pembangunan masyarakat lokal dan kurang tanggap terhadap kepentingan dan kebutuhan akan masyarakat di tingkat desa. Hal ini menyebabkan partisipasi dan spirit masyarakat untuk mengembangkan potensi lokal tidak dapat berkembang dengan wajar.

Partisipasi memang telah lama menjadi penghias bibir para pejabat dari tingkat pusat sampai tingkat desa bahwa

pembangunan dan kelestarian hasil pembangunan tidak akan berhasil bila tidak didukung dengan “partisipasi masyarakat”. Namun konsep partisipasi masyarakat yang digunakan oleh para pejabat jauh berbeda dengan konsep partisipasi yang sebenarnya. Partisipasi masyarakat menurut pejabat hanya ditekankan dalam hal pembayaran pajak, pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, penerapan teknologi yang diperkenalkan atau mengkonsumsi produk dalam negeri serta kontribusi materi yang berupa tanah, batu, semen, dan lain-lain.

Uraian mengenai pentingnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan tersebut sejalan dengan pendapat Conyers

^{√)} *Khoirul Kholik Nasution adalah Dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Graha Nusantara*

(2001:154-155) yang lebih lanjut mengemukakan 3 alasan utama mengapa partisipasi masyarakat dalam perencanaan mempunyai sifat sangat penting:

1. Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat.
2. Masyarakat akan lebih mempercayai program kegiatan pembangunan apabila mereka dilibatkan dalam persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk program kegiatan tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap program kegiatan tersebut.
3. Mendorong partisipasi umum karena akan timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan.

Banyak fenomena menarik dalam proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan di Kecamatan Arse Kabupaten Tapanuli Selatan, terutama berkaitan dengan langkah ke 3 pada tahap pertama proses perencanaan pembangunan dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2004 yang berbunyi: Melibatkan masyarakat (*Stakeholders*) dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan. Diawali dengan penyelenggaraan musrenbang tingkat desa, musrenbang tingkat kecamatan, musrenbang tingkat kabupaten. Hal menarik tersebut antara lain: mekanisme perencanaan pembangunan dari bawah yang dilaksanakan mulai musrenbang desa sampai kecamatan belum melibatkan masyarakat untuk memutuskan prioritas kegiatan, padahal untuk menciptakan perencanaan pembangunan yang tepat waktu, tepat sasaran, berdaya guna dituntut adanya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan karena masyarakatlah yang mengetahui

permasalahan yang dihadapi dan kebutuhan yang mereka kehendaki, sehingga keikutsertaan masyarakat dapat mengakomodasi kepentingan mereka dalam proses penyusunan rencana pembangunan.

Hal menarik lain adalah proses perencanaan pembangunan belum diawali dengan kegiatan pendahuluan untuk mendapatkan data yang valid mengenai potensi, masalah, dan kebutuhan masyarakat. Riyadi dan Bratakusumah (2004:90) mengemukakan bahwa perencanaan pembangunan tidak mungkin hanya dilakukan di atas kertas tanpa melihat realitas di lapangan. Data valid di lapangan sebagai data primer merupakan ornamen-ornamen penting yang harus ada dan digunakan menjadi bahan dalam kegiatan perencanaan pembangunan. Dengan demikian perencanaan pembangunan dapat diartikan sebagai suatu proses perumusan alternatif-alternatif atau keputusan-keputusan yang didasarkan pada data-data dan fakta-fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan/aktivitas kemasyarakatan baik yang bersifat fisik (mental spiritual) dalam rangka pencapaian tujuan yang lebih baik.

Berikut jadwal pelaksanaan musrenbang mulai dari tingkat Desa sampai dengan tingkat Nasional:

Tabel 1. Jadwal Pelaksanaan Musrenbang mulai tingkat Desa sampai Nasional

No	Tingkatan Musrenbang	Bulan ke											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Desa	v	v										
2	Kecamatan			v									
3	Kabupaten			v									
4	Provinsi				v								
5	Nasional					v							

Sumber: Bappeda Kabupaten Tapanuli Selatan

Prioritas pembangunan daerah yang menjadi sasaran penetapan rencana kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli

Selatan Tahun 2015 merupakan penjabaran tahun keempat dari RPJMD 2012-2016 dengan memperhatikan isu strategis atau isu kebijakan pembangunan. Selain itu penentuan prioritas pembangunan memperhatikan pula capaian kinerja periode sebelumnya, kerangka ekonomi daerah dan kemampuan pendanaan, visi dan misi Pemerintah Kabupaten, prioritas pembangunan Propinsi Sumatera Utara dan pemerintah Pusat maupun aspirasi masyarakat/kebutuhan pembangunan yang telah diidentifikasi selama proses pelaksanaan Musrenbang, sehingga pada akhirnya berakumulasi menjadi prioritas pembangunan daerah. Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pembangunan daerah serta memberikan arahan yang jelas bagi perencanaan pembangunan yang lebih rinci ke dalam program/kegiatan pembangunan, maka pada masing-masing prioritas pembangunan dilengkapi dengan fokus-fokus program, sehingga intervensinya menjadi terarah sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.

prioritas pembangunan di Kabupaten Sukabumi ditetapkan sebanyak 11 (sebelas) prioritas, sebagai berikut:

1. Prioritas Utama

- 1) Penanggulangan kemiskinan berbasis wilayah.
- 2) Peningkatan akses pendidikan yang berkualitas.
- 3) Peningkatan kualitas kehidupan beragama.
- 4) Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan pelayanan sosial.
- 5) Penciptaan iklim investasi yang kondusif bagi pengembangan sektor unggulan daerah.
- 6) Penataan dan pengembangan kelompok-kelompok usaha masyarakat dan koperasi.

- 7) Pengembangan sentra-sentra agro industri.

2. Prioritas Penunjang

- 1) Peningkatan kualitas kinerja pemerintahan daerah.
- 2) Peningkatan peran seerta masyarakat dalam pembangunan.
- 3) Peningkatan infrastruktur

3. Prioritas Khusus

- 1) Pemekaran wilayah.

(Sumber: RPJMD Kabupaten Tapanuli Selatan 2012-2016).

Dokumen perencanaan daerah Kabupaten Tapanuli Selatan terbagi atas:

- a. Dokumen Perencanaan Tahunan Daerah
- b. Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah
- c. Dokumen Perencanaan Pembangunan jangka Panjang

Hal-hal tersebut di atas merupakan gambaran awal dari penelitian tentang partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Arse Kabupaten Tapanuli Selatan.

Pengertian pembangunan adalah pergeseran dari suatu kondisi nasional yang satu menuju kondisi nasional yang lain, yang dipandang lebih baik dan lebih berharga (Tjokrowinoto, 2005:46). Disamping itu pembangunan juga merupakan proses multi dimensional yang menyangkut perubahan-perubahan yang penting dalam suatu struktur, sistem sosial ekonomi, sikap masyarakat dan lembaga- lembaga nasional dan akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengangguran kesenjangan dan pemberantasan kemiskinan absolut (Todaro, 2007:89). Pengertian tersebut mengisyaratkan bahwa pembangunan berarti proses menuju perubahan- perubahan yang

dimaksudkan untuk memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat itu sendiri.

Dalam pengertian pembangunan para ahli memberikan berbagai macam definisi tentang pembangunan, namun secara umum ada suatu kesepakatan bahwa pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan. Siagian (2004:90) memberikan pengertian tentang bagaimana pembangunan sebagai “suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*Nation building*)”. Adapun Ginanjar Kartasasmita (2007:9) memberikan pengertian yang lebih sederhana tentang pembangunan yaitu: “suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana”.

Pengertian perencanaan secara umum adalah berasal dari kata rencana, yang berarti rancangan atau rangka sesuatu yang akan dikerjakan. Menurut Waterson (2004: 4) pada hakekatnya perencanaan adalah usaha yang secara sadar terorganisasi dan terus menerus dilakukan guna memilih alternatif terbaik dari sejumlah alternatif untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan Diana Conyers (2004: 4) menyatakan bahwa perencanaan adalah suatu bentuk latihan intelegensia guna mengolah fakta serta situasi sebagaimana adanya dan mencari jalan keluar guna memecahkan masalah. Kemudian Diana Conyers (2004: 4) menyatakan bahwa perencanaan adalah seni untuk melakukan sesuatu yang akan datang agar dapat terlaksanakan. Definisi lain diungkapkan Kunarjo (2002:14) yang menyebutkan bahwa secara umum perencanaan merupakan proses penyiapan seperangkat keputusan untuk dilaksanakan pada waktu yang akan datang yang diarahkan pada pencapaian sasaran tertentu.

Pengertian perencanaan pembangunan dapat dilihat berdasarkan unsur-unsur yang membentuknya yaitu: perencanaan dan pembangunan. Perencanaan menurut Hasibuan (2003:95) adalah memilih dan menghubungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Pengertian pembangunan menurut Siagian adalah suatu usulan atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukn secara sadar oleh suatu bangsa negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.

Perencanaan menurut Riyadi dan Bratakusumah (2004:4) berarti memilih prioritas dan cara atau alternatif untuk mencapai tujuan, pengalokasian sumber daya, bertujuan mencapai tujuan, berhubungan dengan masa depan, serta kegiatan yang terus menerus. Pendapat ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Conyers (2001:3) bahwa planning atau perencanaan adalah sebagai: “suatu proses yang terus menerus yang melibatkan keputusan-keputusan, alternatif-alternatif atau pilihan, mengenai cara- cara alternatif penggunaan sumber-sumber daya, dengan tujuan menghasilkan sasaran-sasaran spesifik untuk waktu yang akan datang”.

Untuk membahas partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah perlu kiranya diketahui perkembangan pembangunan di daerah yang selama ini dilakukan oleh pemerintah karena walau bagaimanapun peran pemerintah dalam pembangunan yang selama ini tidak terlepas dari peran masyarakat maka keberadaan masyarakat juga tidak dapat dipandang sebelah mata dalam kehidupan bernegara dan

dalam kegiatan pembangunan. Beberapa hal yang dianggap penting untuk dibahas di dalam penelitian ini antara lain:

Partisipasi selain telah menjadi kata kunci dalam pembangunan, juga menjadi salah satu karakteristik dari penyelenggaraan pemerintah yang baik. Secara etimologi, partisipasi berasal dari bahasa Inggris “*participation*” yang berarti mengambil bagian/keikutsertaan. Dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia dijelaskan “partisipasi” berarti: hal turut berperan serta dalam suatu kegiatan, keikutsertaan, peran serta. Secara umum pengertian dari partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah keperansertaan semua anggota atau wakil-wakil masyarakat untuk ikut membuat keputusan dalam proses perencanaan dan pengelolaan pembangunan termasuk di dalamnya memutuskan tentang rencana-rencana kegiatan yang akan dilaksanakan, manfaat yang akan diperoleh, serta bagaimana melaksanakan dan mengevaluasi hasil pelaksanaannya.

Melihat dampak penting dan positif dari perencanaan partisipatif, dengan adanya partisipasi masyarakat yang optimal dalam perencanaan diharapkan dapat membangun rasa kepemilikan yang kuat dikalangan masyarakat terhadap hasil-hasil pembangunan yang ada. Soemarmo (2005:26) mengemukakan bahwa pada dasarnya masyarakat dapat dilibatkan secara aktif sejak tahap awal penyusunan rencana. Keterlibatan masyarakat dapat berupa: (1) pendidikan melalui pelatihan, (2) partisipasi aktif dalam pengumpulan informasi, (3) partisipasi dalam memberikan alternatif rencana dan usulan kepada pemerintah.

Menurut Juliantara (2002:87) substansi dari partisipasi adalah bekerjanya suatu sistem pemerintahan dimana tidak ada kebijakan yang diambil tanpa adanya persetujuan dari rakyat, sedangkan arah dasar yang akan dikembangkan adalah

proses pemberdayaan, lebih lanjut dikatakan bahwa tujuan pengembangan partisipasi adalah:

Pertama, bahwa partisipasi akan memungkinkan rakyat secara mandiri (otonom) mengorganisasi diri, dan dengan demikian akan memudahkan masyarakat menghadapi situasi yang sulit, serta mampu menolak berbagai kecenderungan yang merugikan.

Kedua, suatu partisipasi tidak hanya menjadi cermin konkrit peluang ekspresi aspirasi dan jalan memperjuangkannya, tetapi yang lebih penting lagi bahwa partisipasi menjadi semacam garansi bagi tidak diabaikannya kepentingan masyarakat. *Ketiga*, bahwa persoalan-persoalan dalam dinamika pembangunan akan dapat diatasi dengan adanya partisipasi masyarakat. (Soemarmo, 2005: 89-90).

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan perspektif pendekatan kualitatif. Menurut Moleong (2006:5) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Adapun Moleong (2006:4) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sejalan dengan definisi tersebut, Moleong (2006:4) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.

Menurut Nazir (2003:167), penelitian deskriptif adalah studi untuk menemukan fakta dengan interpretasi yang tepat, melukiskan secara tepat sifat-sifat dari beberapa fenomena kelompok atau individu, menentukan frekuensi terjadinya suatu keadaan untuk meminimalkan bias dan memaksimalkan reabilitas. Analisanya dikerjakan berdasarkan *ex post facto*, artinya data dikumpulkan setelah semua kejadian berlangsung (Nazir, 2003:105). Metode deskriptif umumnya memiliki 2 ciri khas utama: (1) memusatkan diri pada masalah-masalah yang ada sekarang; (2) data yang dikumpulkan pertama kali disusun, dijelaskan kemudian dianalisa karena itu metode deskriptif sering disebut metode analisa. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok-kelompok tertentu atau menemukan penyebaran (frekuensi) suatu gejala dan gejala lainnya dalam masyarakat.

Berikut ini informan-informan yang menjadi sumber data dalam penelitian ini:

1. Bappeda sebagai lembaga yang berkepentingan dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
2. Camat Arse;
3. Perangkat Kecamatan;
4. Kepala Desa;
5. Perwakilan Masyarakat.

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara semi struktur;

Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori in-depth interview, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka,

dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya (Sugiyono, 2010:23).

2. Observasi

Observasi atau biasa dikenal dengan pengamatan adalah salah satu metode untuk melihat bagaimana suatu peristiwa, kejadian, hal-hal tertentu terjadi. Observasi menyajikan gambaran rinci tentang aktivitas program, proses dan peserta. Dalam penelitian ini menggunakan observasi partisipasi pasip yaitu peneliti datang di tempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.

Prinsip utama dalam analisa data adalah bagaimana menjadikan data atau informasi yang telah dikumpulkan disajikan dalam bentuk uraian dan sekaligus memberikan makna atau interpretasi sehingga sehingga informasi tersebut memiliki signifikansi ilmiah atau teoritis.

Analisis data kualitatif menurut Moleong (2006:248) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang diceritakan kepada orang lain. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Teknik analisa data ini menguraikan, menafsirkan dan menggambarkan data yang terkumpul secara sistemik dan sistematis.

Dalam model ini kegiatan analisis dibagi menjadi 3 tahap, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan.

1. Tahap reduksi data

Reduksi data yaitu proses pemilihan data kasar dan masih mentah yang berlangsung terus menerus selama

penelitian berlangsung melalui tahapan pembuatan ringkasan, memberi kode, menelusuri tema, dan menyusun ringkasan. Tahap reduksi data yang dilakukan penulis adalah menelaah secara keseluruhan data yang dihimpun dari lapangan mengenai partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Arse Kabupaten Tapanuli Selatan, kemudian memilah-milahnya ke dalam kategori tertentu.

2. Tahap penyajian data

Seperangkat hasil reduksi data kemudian diorganisasikan ke dalam bentuk matriks (display data) sehingga terlihat gambarannya secara lebih utuh. Penyajian data dilakukan dengan cara penyampaian informasi berdasarkan data yang dimiliki dan disusun secara runtut dan baik dalam bentuk naratif, sehingga mudah dipahami. Dalam tahap ini peneliti membuat rangkuman secara deskriptif dan sistematis sehingga tema sentral yaitu partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Arse Kabupaten Tapanuli Selatan dapat diketahui dengan mudah.

3. Tahap Verifikasi data/penarikan simpulan

Verifikasi data penelitian yaitu menarik simpulan berdasarkan data yang diperoleh dari berbagai sumber, kemudian peneliti mengambil simpulan yang bersifat sementara sambil mencari data pendukung atau menolak simpulan. Pada tahap ini, peneliti melakukan pengkajian tentang simpulan yang telah diambil dengan data pembandingan teori tertentu. Pengujian ini dimaksudkan untuk melihat kebenaran hasil analisis yang melahirkan simpulan yang dapat dipercaya.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil Penelitian

Mekanisme perencanaan pembangunan tahunan diuraikan sebagai kegiatan atau aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan masing-masing tahapan proses perencanaan dari bawah. Pelaksanaan mekanisme perencanaan dari bawah diatur oleh Peraturan Bupati No. 11 Tahun 2007 tentang tata cara penyusunan penetapan dan pelaporan rencana kerja pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan yang menggariskan pedoman pelaksanaan perencanaan berikut ini:

1. Tahapan penyusunan dan penetapan rencana kerja pembangunan daerah
2. Tahapan penyusunan dan penetapan rencana kerja pemerintah daerah dilaksanakan melalui urutan kegiatan sebagai berikut :
3. Penyusunan rencana kerja pembangunan daerah dan rencana kerja pemerintah daerah dilaksanakan berdasarkan jadwal yang terintegrasi dengan sistem perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan tahunan Provinsi Sumatera Utara.
4. Perencanaan daerah didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
5. Kelembagaan:
 - a. Penyelenggara dan penanggung jawab MUSRENBANG.
 - b. Penyusunan dan penganggaran APBD,
 - c. Pelaporan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
6. Kepala Desa/Lurah berdasarkan hasil musyawarah perencanaan pembangunan desa/ kelurahan wajib menetapkan daftar prioritas program/ kegiatan pembangunan sesuai rencana kerja pembangunan desa/ kelurahan (RKP

Desa/ Kelurahan) dan mengacu pada Rencana Strategis Kecamatan dan kemampuan/ ketersediaan sumber anggaran.

7. Camat berdasarkan hasil musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan wajib menetapkan daftar prioritas program/ kegiatan pembangunan kecamatan yang bersifat lintas desa dan/ atau lintas kecamatan.
8. Daftar prioritas program/ kegiatan ditetapkan plafon anggaran paling sedikit 20% dari Belanja Langsung APBD dengan mengacu pada program RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja SKPD, serta Renstra dan Renja Kecamatan.
9. Daftar program/ kegiatan pembangunan kecamatan merupakan prioritas bahan penyusunan program/ kegiatan SKPD.
10. Bupati berdasarkan hasil musyawarah perencanaan pembangunan kabupaten wajib menetapkan rancangan akhir Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang memuat daftar prioritas program/ kegiatan pembangunan kabupaten sesuai perkiraan plafon anggaran dari berbagai sumber pembiayaan dengan mengacu pada program tahunan dalam RPJMD dan kewenangan urusan SKPD.
11. Daftar prioritas program/ kegiatan yang ditetapkan dalam Rancangan Akhir RKPD, setelah ditetapkan melalui Keputusan Bupati, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum, Prioritas dan Plafon Anggaran, serta Rancangan APBD.

Bila dilihat dari tahap persiapan dan tahap pelaksanaan proses perencanaan pembangunan yang telah diselenggarakan oleh masing-masing desa diperoleh gambaran sebagai berikut:

1. Kegiatan menampung dan menetapkan

prioritas kebutuhan dari tingkat bawah (tingkat RT/RW) belum dilaksanakan dengan baik.

2. Dari hasil pencatatan, sebagaimana disampaikan oleh kepala dusun dan warga Kelurahan Arse bahwa musbangdus (musyawarah pembangunan tingkat dusun) mencerminkan para tokoh-tokoh masyarakat baru mendiskusikan jenis usulan yang diajukan pada saat pelaksanaan musbang dusun tersebut, dan bukan digali dari kelompok-kelompok masyarakat (tingkat Desa).
3. Menetapkan prioritas kegiatan yang akan diajukan ke Kecamatan terpenuhi, meskipun untuk masing-masing desa, penetapan prioritas kegiatan dilakukan oleh Kepala Desa beserta aparat dan LPMD tanpa melibatkan masyarakat,. Disamping itu, keterbatasan pemahaman masyarakat juga merupakan salah satu kendala dalam memberikan sumbangan pemikiran, sehingga keaktifan masyarakat dinilai rendah dalam proses perencanaan pembangunan.

Legalitas perencanaan disini maksudnya adalah bahwa perencanaan pembangunan yang dilakukan di Kecamatan Arse sesuai dengan regulasi yang ada dan dapat dipertanggungjawabkan. Perencanaan pembangunan mengacu pada semua peraturan yang berlaku yaitu berdasarkan pada: yang pertama, ditingkat nasional sumber hukum yang digunakan dalam perencanaan pembangunan adalah Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang kedua ditingkat Kabupaten mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2007 tentang tata cara penyusunan, penetapan dan pelaporan Rencana Kerja Pemerintah daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Meskipun berdasarkan beberapa

informan mengatakan bahwa ketrelibatan masyarakat hanya terbatas pada tahap merumuskan kegiatan saja, tidak terlibat dalam pengambilan keputusan dalam memutuskan kegiatan prioritas, itu pun masyarakat yang terlibat dalam proses perencanaan pembangunan di tingkat Desa maupun Kecamatan hanya sebagian kecil masyarakat saja, dan sebagian besar adalah mereka yang sudah beberapa kali ikut terlibat dalam proses perencanaan pembangunan tersebut.

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa Perencanaan pembangunan berdasarkan kesepakatan masyarakat melalui Musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) sehingga sesuai sumber hukum dalam perencanaan pembangunan dan menjunjung etika dan nilai yang ada di masyarakat.

3.2. Pembahasan

Pelaksanaan perencanaan partisipatif di Kecamatan Arse kabupaten Tapanuli Selatan dilakukan dalam rangka menyusun perencanaan pembangunan tahunan kecamatan berupa daftar prioritas kegiatan kecamatan yang akan disampaikan pada proses yang lebih tinggi.

Fokus perencanaan yang berdasarkan masalah dan kebutuhan masyarakat dapat diperoleh melalui kegiatan penyelidikan masalah dan kebutuhan mulai dari tingkat RT yang merupakan bagian dari tahap persiapan dalam proses perencanaan pembangunan. Berdasarkan hasil penelitian, untuk beberapa desa melakukan kegiatan penyelidikan masalah dan kebutuhan masyarakat mulai tingkat RT sehingga diperoleh profil masalah dan kebutuhan masyarakat, namun untuk sebagian desa lainnya jenis usulan yang diajukan didiskusikan pada saat pelaksanaan musbang

dusun, dan bukan digali dari kelompok-kelompok masyarakat.

Partisipasi masyarakat dimana setiap masyarakat memperoleh peluang yang sama dalam sumbangan pemikiran tanpa dihambat oleh kemampuan berbicara, waktu dan tempat, serta masyarakat dilibatkan dalam memutuskan kegoatan mana yang dianggap prioritas untuk diajukan ke musrenbang yang lebih tinggi.

Sinergitas perencanaan yaitu selalu menekankan kerja sama antar wilayah dan geografi, serta interaksi diantara stakeholders. Hasil kesepakatan peserta musrenbang kecamatan berupa daftar prioritas usulan/kegiatan kecamatan yang merupakan hasil kerja sama anatar wilayah administrasi dan geografi serta merupakan hasil interaksi antara stakeholders. Pada umumnya dapat diterima peserta musrenbang khususnya dan masyarakat kecamatan Arse umumnya.

Jika dilihat dari proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Arse, prinsip dasar di atas belum dikembangkan, mengingat beberapa keterbatasan akan sumber daya manusia, keterbatasan pemahaman masyarakat dan aparatur pemerintah baik pemerintah Desa maupun pemerintah di tingkat kecamatan akan proses perencanaan pembangunan.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian yang telah disajikan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Arse Kabupaten Tapanuli Selatan belum dilaksanakan secara optimal;
2. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Arse Kabupaten Tapanuli

Selatan masih rendah.

4.2. Saran

Dari temuan penelitian disarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Perlu penyempurnaan tahapan pelaksanaan perencanaan partisipatif agar dapat dilaksanakan secara simpel dan mudah dipahami baik oleh perangkat pemerintah desa dan kecamatan maupun masyarakat dengan tidak mengurangi prinsip-prinsip partisipatif.
2. Pemerintah Desa perlu mengoptimalkan kegiatan identifikasi masalah dan kebutuhan masyarakat mulai tingkat RT supaya Desa mempunyai data tentang potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat serta Pemerintah Desa mengoptimalkan pemanfaatan data tersebut.
3. Perlu ada peningkatan pemahaman perangkat desa/kecamatan, unsur pembangunan dan unsur masyarakat mengenai mekanisme perencanaan pembangunan, pentingnya perencanaan pembangunan melalui kegiatan pelatihan atau penambahan wawasan, pendekatan yang aktif melalui kader pembangunan kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam proses perencanaan pembangunan.
4. Perlu sosialisai yang optimal dengan memberdayakan pemerintah Desa, Kecamatan, SKPD, dan kader pembangunan dalam pemberian informasi kepada masyarakat di Kecamatan Cibadak. Sosialisasi yang optimal ini untuk memberikan kejelasan mengenai proses perencanaan pembangunan kepada masyarakat agar mereka lebih banyak terlibat dalam proses tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Conyers, Diana, 2004, *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga: Suatu Pengantar*, Gadjah Mada University Press: Yogyakarta.
- Hasibuan, Malayu, S.P.Drs, 2003, *Manajemen: Dasar, Pengertian dan Masalah*, CV. Haju Masagung: Jakarta.
- Kunarjo, 2002, *Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan*, Universitas Indonesia UI Press: Jakarta.
- Kartasasmita, Ginanjar, 2007, *Administrasi Pembangunan*, LP3ES: Jakarta.
- Moleong, Lexy, 2001, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosada Karya: Bandung.
- Michael, Todaro, 2007, *Pembangunan ekonomi di dunia Ketiga*, Erlangga: Jakarta.
- Nazir, Muhamad, 2003, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Riyadi dan Bratakusumah, D.S, 2004, *Perencanaan Pembangunan Daerah*, PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Siagian, Sondang P, 2004, *Administrasi Pembangunan*, Gunung Agung: Jakarta.
- Sugiyono, 2010, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta: Bandung.
- Soemarmo, 2005, *Analisis Pelaksanaan Pendekatan Partisipatif Pada Proses Perencanaan Pembangunan Di Kota Semarang (Studi Kasus Pelaksanaan Penjaringan Aspirasi Masyarakat Di Kecamatan Banyumanik)*, Tesis, Magister Administrasi Publik, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Tjokroamidjojo, Bintoro, 2005, *manajemen Pembangunan*, Gunung Agung: Jakarta.